

Literasi Media dan Pendidikan Demokrasi Dalam Masyarakat Informasi

LUH SURYATNI
luhsuryatni@gmail.com

ABSTRACT

The importance of media literacy and democratic education for Indonesia society is not only related to the high media exposure or the tsunami of information from the media itself, but also relates to several factors. The first factor is the important role of information in the democratic process. Second is the important role of cultural and citizenship participation, then the third factor is the development of popular culture which made more children and adolescents access digital media in higher frequency. The purpose of writing this paper is to discuss how media literacy and democratic education in the information society to be more intelligent, critical, and wise in choosing information. The data collection method used is a literature study with descriptive analysis techniques. The results of the discussion show that media literacy and democratic education can be a compass for information society to be more intelligent, critical, and wise in choosing information so that they are not trapped in a tsunami of information from the media or become victims of fake facts (hoax) and fake news that can impact the life in society, nation and state.

Keywords: *Media literacy, democratic education, information society*

ABSTRAK

Arti penting literasi media dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tingginya terpaan media atau tsunami media informasi, melainkan berhubungan juga dengan beberapa faktor. Faktor pertama adalah peran penting informasi dalam proses demokrasi. Kedua adalah peran penting partisipasi budaya dan kewarganegaraan, kemudian faktor ketiga adalah berkembangnya budaya populer membuat anak dan remaja semakin banyak mengakses media digital. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membahas bagaimana literasi media dan pendidikan demokrasi dalam masyarakat informasi untuk lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam memilih informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan teknik analisa deskriptif. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa literasi media dan pendidikan demokrasi dapat menjadi kompas bagi masyarakat informasi untuk lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam memilih informasi sehingga tidak terjebak dalam tsunami media informasi atau menjadi korban fakta palsu (hoax) maupun berita palsu yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata kunci: *Literasi media, pendidikan demokrasi, masyarakat informasi*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai literasi media, tidak terlepas dari pendidikan demokrasi dalam masyarakat informasi, karena yang dapat menggunakan hal tersebut adalah manusia/individu dalam masyarakat sebagai salah satu dari faktor Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti apa yang telah di atur

dalam pasal 28F UUDNRI 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, maupun mengolah dan menyempurnakan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia”. Jadi khusus untuk media sosial telah diatur dalam Undang – Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula- mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu dia pun mengetahui, bahwa dalam berbagai hal dia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan bagi dirinya sendiri. Sementara semakin meningkat usianya mulai mengetahui, bahwa dalam hubungannya dengan yang lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh semaunya.

Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil, dalam arti yang sangat terbatas. Ayah, ibu, dan, saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang terlarang. Hal ini lama-kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak dilahirkan di dunia ini

manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan, yang akan melahirkan suatu peradaban sebagai dasar dalam kehidupan manusia.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, di antara sekian macam kaidah yang merupakan salah-satu kaidah terpenting adalah kaidah-kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran.

Manusia saat ini terhubung dengan berbagai aplikasi media social yang membantu mereka untuk terhubung dengan manusia lain yang bisa berjarak ribuan mil melalui layar dan jaringan. Namun pada saat yang sama membuat jarak dengan mereka yang dekat dan mengalienasi mereka dengan lingkungan sosialnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka hidup bukan hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata. Manusia pun terjebak menjadi mahluk citra, baik dalam artian secara harfiah maupun secara kiasan. Media sosial itu bisa dianggap sebagai rumah atau diri sendiri di dunia maya.

Nasionalisme di dalam Tamansari Internasionalisme adalah awal Era

Convergensi/ Bhinneka Tunggal Ika Abad ke 21 Revolusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang mendorong terjadinya Globalisasi (Sutanto Yusuf, 2018; 50), dimana setiap orang bisa berhubungan *People to People*. Kini terasa semakin diperlukan pendidikan transformasi kreatif dari *inward looking*, perlu diimbangi dengan *outward looking* sebagai *Citizen*, sekaligus *Netizen* dan warga *universe* yang satu. Pancasila menjadi *light star* untuk memandu kehidupan di dalam negeri sekaligus peradaban masa depan menjadi Jaringan Pengaman Peradaban Dunia. Indonesia diharapkan untuk meneruskan dan memimpin *Era of The Grand Convergence*. Kalau dulu orang berebut dan berkompetisi untuk menguasai karena the winner bisa takes all, maka ke depan memerlukan transformasi menuju kompetisi untuk menemukan siapa yang paling bisa melayani. Hanya mereka yang mempunyai CQ (kecerdasan kompetisi tinggi) yang bisa memimpin perubahan menuju masa depan yang adil, damai dan beradab.

Dalam dunia virtual di mana internet menjadi media baru yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan adanya pemahaman dan agensi penggunaannya sebab teknologi hanyalah alat semata yang tidak menentukan bagaimana pengguna internet harus bertindak (Koltay, 2011; 212) (dalam Novi Kurnia, 2017;7). Untuk itu, dibutuhkan serangkaian pemahaman dan tindakan dengan menerapkan berbagai literasi media. Arti penting literasi media tidak hanya berkaitan dengan tingginya terpaan media, melainkan juga berhubungan dengan beberapa faktor lainnya, di antaranya: pertama, peran penting informasi dalam proses demokrasi. Kedua, peran penting partisipasi budaya dan

kewarganegaraan. Ketiga, berkembangnya budaya populer membuat anak dan remaja semakin banyak mengakses media digital.

Teknologi adalah penting, tanpa teknologi hidup ini seolah-olah tanpa memiliki makna. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sudah dapat dirasakan masyarakat Indonesia sampai ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Melalui komunikasi, dengan cepat informasi yang ada di daerah menyebar ke seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Sebaliknya, informasi dan kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia juga dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok desa. Oleh karena itu, gaya hidup bangsa Indonesia sudah mulai bergeser dan mulai melupakan kebudayaan aslinya. Kebudayaan aslinya sudah dianggap ketinggalan zaman dan diganti dengan kebudayaan luar yang kurang sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI 1945. Perkiraan empat belas tahun ke depan atau dua puluh enam tahun ke depan atau tepatnya satu abad kemerdekaan Indonesia (tahun 2045), jika kebudayaan suku bangsa Indonesia tidak digalakkan dan kurang ditekankan pengajarannya di sekolah-sekolah dan juga di luar sekolah, maka kebudayaan sukubangsa akan dilupakan generasi akan datang dan diganti dengan budaya-budaya asing. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja membawa dampak positif bagi manusia, tapi juga telah memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia.

Saat ini pengguna internet di Indonesia lebih dari 50%. Hal itu berarti sekitar 143 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. “Dan 68%

adalah anak-anak jaman now, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak hanya bisa tahan 7 menit tidak memegang HP,". Dilihat dari penyebaran ponsel, terdapat sekitar 415 juta ponsel yang beredar di Indonesia. "Itu berarti melebihi jumlah penduduk Indonesia, itulah sebabnya pemilik kartu pra bayar harus registasi ulang. Sebab satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun, sampai puluhan bahkan ratusan akun dimiliki untuk menyerang orang lain,"(Dirjen IKP Kementerian Kominfo) . Literasi media sangat penting untuk memfilter berbagai bentuk informasi, apalagi informasi yang sumbernya tidak jelas, informasi yang judul dan isi tidak sinkron, huruf yang di bold atau cetak miring, itu adalah ciri-ciri *hoax*, sebaiknya langsung dihapus.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah literasi media dan pendidikan demokrasi sangat diperlukan bagi masyarakat informasi untuk kritis dan cerdas dalam memilih informasi yang sumbernya jelas. Di mana sampai saat ini banyak masyarakat informasi terjebak dalam fakta palsu(*hoax*) atau berita palsu (*fake news*) dan dapat membawa dampak negatif baik individu maupun anggota masyarakat sebagai ujung tombak bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : "Bagaimana literasi media dan pendidikan demokrasi dapat mencerdaskan masyarakat informasi demi kelangsungan hidup bangsa dan negara?"

Tujuan penulisan untuk mengkaji dan membahas pentingnya literasi media dan pendidikan demokrasi dalam masyarakat informasi untuk lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam memilih informasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah ber-sumber dari kepustakaan yang bersifat objektif dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Media dan Pendidikan Demokrasi

Selain nilai demokratisasi yang didorong kecerdasan kolektif, Kovach dan Rosenstiel (2011) menambahkan implikasi yang harus diwaspadai dari perkembangan media baru. Sebuah tsunami informasi di mana dunia maya saat ini seperti angkasa luas tempat milyaran informasi bertebaran. Jika tidak berhati-hati memeriksa setiap informasi yang ditemui, masyarakat akan mudah tersesat di dalamnya (Kovach & Rosenstiel, 2011). Meskipun tren informasi menyesatkan, yang saat ini populer dengan sebutan *hoax*, telah muncul jauh sebelum media baru hadir. Namun perkembangannya semakin pesat dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Bahkan ilmu pengetahuan dan sejarah yang telah lama dipahami sebagai kebenaran, di era media baru semua kembali diperdebatkan (Lewandowsky, dkk., 2013).

Piliang (2010) menggambarkan fenomena ini dengan konsep realitas semu, yang mampu merubah fantasi, halusinasi, ilusi, atau science-fiction menjadi seolah nyata; mampu mereproduksi ulang masa lalu dan nostalgia; mampu melipat-lipat dunia sehingga tak lebih luas dari sebuah genggam tangan. Artinya dari seluruh gambaran atas hadirnya media baru ini, perlu adanya sebuah pembaruan konsep atas apa yang disebut melek media baru, atau konsep literasi media baru.

Literasi media merupakan suatu kontinum (Potter, 2001) sehingga tidak bisa dikatakan bahwa seseorang telah berada pada derajat literasi yang penuh meskipun ia seorang profesional media. Literasi media selalu berkembang. Literasi media tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengetahuan dan skill, tetapi juga suatu state of mind yang memerlukan monitoring secara berkelanjutan (Rosenbaum, dkk., 2008).

Dengan demikian literasi media penting dalam mencari, memilih dan memilah informasi sehingga bisa membedakan informasi yang obyektif dan akurat dengan *hoax* maupun fake news yang tidak bermanfaat bahkan cenderung merusak. Dalam *hoax* maupun fake news, kesalahan dibuat secara disengaja untuk maksud-maksud tertentu, termasuk maksud penyesatan (desepsi) informasi. Kebenaran atau fakta politik sering dilawan dengan fakta palsu (*hoax*) atau berita palsu (fake news) dan medsos merupakan tempat perang budaya terjadi secara masif baik di tingkat nasional maupun global (Ibrahim, 2011: 278) (dalam Joko Sutarmo, 2017; 183). Disinformasi tidak lagi karena kesalahan tetapi terjadi secara sengaja sehingga mengarah pada penyesatan (desepsi) informasi. Fakta tidak dilawan dengan fakta tetapi dilawan dengan *hoax* dan *fake news*. Kebenaran menjadi relatif dan pemegang kebenaran adalah mereka yang mampu mengendalikan informasi.

Sementara itu, Baran & Dennis memandang literasi media sebagai suatu rangkaian gerakan melek media, yaitu gerakan melek media dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Melek media dilihat sebagai keterampilan yang

dapat dikembangkan dan berada dalam sebuah rangkaian (dalam Tamburaka, 2013; 8). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi media kini sudah bergerak lebih maju dan terorganisir sehingga generasi selanjutnya dapat mempersiapkan kemampuan literasi media di masa yang akan datang.

Fenomena yang terjadi di masyarakat ini merupakan sebuah urgensi dan perlu penanganan yang serius. Diperlukan satu strategi yang tepat untuk melakukan literasi media, salah satunya adalah dengan menggunakan kearifan lokal, dan kecerdasan lokal berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kearifan lokal dan kecerdasan lokal dengan akulturasi menjadi kekuatan untuk membangun kecerdasan dalam menggunakan media.

Melek media atau "*media literacy*" adalah sebuah alternatif yang bertujuan untuk memberdayakan publik di tengah kepujungan media. Konsep ini memiliki tujuan untuk mendidik publik supaya mampu berinteraksi dan memanfaatkan media secara cerdas dan kritis, sehingga publik tidak mudah dibodohi media dan tidak mudah dieksploitasi media untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada kebutuhan publik. Tindakan konkret melek media adalah pendidikan dan pelatihan bagi publik supaya mampu memahami isi media, mampu mengakses dan menggunakan media, serta mampu berkomunikasi melalui media secara interaktif.

Douglas Kellner mengatakan bahwa masyarakat sebetulnya dapat menolak pengaruh-pengaruh budaya media dengan menggunakan budaya yang mereka miliki. Pesan-pesan dominan yang disampaikan oleh media massa dan penciptaan pembacaan serta pemanfaatan

pribadi terhadap budaya yang diproduksi secara massal oleh media dapat difilter dengan menggunakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sumber pemberdayaan diri mereka dan menciptakan makna identitas dan bentuk kehidupan mereka sendiri. Menurut Kellner, ada satu cara yang dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menggunakan media atau masyarakat yang melek media, yaitu dengan menggunakan budaya mereka sendiri.

Kearifan lokal dan kecerdasan lokal merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran budaya yang dijiwai oleh suatu masyarakat lokal, dapat digunakan sebagai filter untuk menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Budaya asing disini termasuk budaya-budaya asing yang terpublikasi ke masyarakat melalui media massa. Nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat digunakan sebagai dasar pada saat menginterpretasikan pengalaman yang mereka peroleh dari media massa, sehingga tingkah laku sosial yang terbentuk merupakan tingkah laku sosial yang sesuai dengan budaya masyarakat itu bukan tingkah laku sosial yang berdasarkan budaya media.

Menurut *National Leadership Conference on Media Education* menyatakan literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Sementara itu, pasal 52 Undang-undang No.32/2003 tentang Penyiaran memaknai literasi media sebagai “kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat” (Iriantara, 2009:25). Pada sisi lain, pendidikan media merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Hal ini

sesungguhnya terkait dengan tujuan pendidikan media yang tidak lagi bertujuan untuk melindungi khalayak media sebagai konsumen produk yang dihasilkan industry media, tetapi juga mempersiapkan khalayak sebagai konsumen media untuk hidup di dunia yang dunia sosialnya sangat bergantung pada media massa. Karena itu, salah satu prinsip dalam pendidikan media atau literasi media adalah memberdayakan khalayak. Disebut memberdayakan, karena dalam pandangan Brow (Iriantara 2009:13), “literasi media menjadi kompas baru dalam mengarungi dunia media.”

Karena, secanggih apapun teknologinya bila orang tidak diberdayakan, maka orang akan menjadi korban media. Tujuan literasi media adalah memberi kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi karena semua pesan media merupakan hasil konstruksi. Sementara itu, Potter (2005: 33) menggambarkan model kognitif literasi media sebagai berikut: Kesadaran kritis khalayak atas realitas media inilah yang menjadi tujuan utama literasi media, hal ini karena media bukanlah entitas yang netral. Media selalu membawa nilai, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Keseluruhannya memberikan dampak bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Untuk memiliki kesadaran kritis tersebut, Potter (2005) merumuskan tujuh kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau masyarakat untuk bisa digolongkan sebagai individu atau masyarakat yang melek media, yakni: (1) Analyze. Kemampuan menganalisa struktur pesan, yang dikemas dalam media, mendayagunakan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan untuk memahami konteks dalam pesan pada media tertentu. (2) Evaluate. Setelah mampu menganalisa, kompetensi berikutnya yang diperlukan

adalah membuat penilaian (evaluasi). Seseorang yang mampu menilai, artinya ia mampu menghubungkan informasi yang ada di media massa itu dengan kondisi dirinya, dan membuat penilaian mengenai keakuratan, dan kualitas relevansi informasi itu dengan dirinya; apakah informasi itu sangat penting, biasa, atau basi.

Tentu saja kemampuan dalam menilai sebuah informasi itu dikemas dengan baik atau tidak, juga adalah bagian dari kompetensinya. Di sini, terjadi proses membandingkan norma dan nilai sosial terhadap isi yang dihadapi dari media. (3) Grouping, yakni kemampuan menentukan setiap unsur yang sama dalam beberapa cara: menentukan setiap unsur yang berbeda dalam beberapa cara. (4) Induction, yakni kemampuan menyimpulkan suatu pola di set kecil elemen, maka pola generalisasi untuk semua elemen dalam himpunan tersebut. (5) Deduction, yakni kemampuan menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan khusus. (6) Synthesis, yakni kemampuan untuk merakit unsur-unsur ke dalam struktur baru (7) Abstracting, yakni kemampuan menciptakan secara singkat, jelas, dan gambaran tepat menangkap esensi dari pesan dalam sejumlah kecil kata-kata dari pada pesan itu sendiri (dalam Alip Kunandar, 2014; 289).

Pendidikan Demokrasi

Kondisi-kondisi seperti ini cukup berarti bagi berkembangnya nilai-nilai dan tradisi demokrasi, sebuah landasan hakiki bagi berjalannya lembaga-lembaga demokrasi di tingkat masyarakat maupun negara. Pelembagaan nilai demokrasi membutuhkan waktu lama dan kadang menjemukan sehingga perlu pendidikan demokrasi secara kontinu. Selanjutnya

pembentukan lembaga politik demokratis dapat dilakukan sambil secara terus-menerus menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Di mana media massa sebagai salah satu pilar demokrasi.

Tantangan demokrasi Indonesia masa depan tergantung apakah kultur masyarakat termasuk para pemimpinnya mendukung penuh tradisi dan nilai-nilai demokrasi sebagai syarat bagi berjalannya lembaga politik demokratis. Dua aspek ini perilaku politik masyarakat dan institusi politik (kultur dan struktur) harus bisa berjalan beriringan. Perilaku politik yang demokratis, namun tanpa disertai berfungsinya institusi politik, tidak akan pernah mewujudkan sistem demokratis. Sebaliknya pula, berjalannya institusi politik tanpa didukung kultur politik demokratis akan menimbulkan dua kemungkinan: demokrasi jatuh pada anarki atau demokrasi mengundang lawannya sendiri, yaitu kediktatoran. Jadi politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi.

Meminjam analisis Gabriel dan Sidney Verba, bahwa kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan kultur, maka membangun masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi. Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu negara. Suatu negara dikatakan negara demokrasi bila di dalamnya

terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi (Dwi Winarno, 2006; 281).

Lembaga itu antara lain; pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, baik cetak maupun elektronik. Membangun institusi demokrasi berarti menciptakan dan menegakkan lembaga-lembaga politik tersebut dalam negara. Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip pendapatnya Henry B. Mayo, nilai-nilai demokrasi meliputi: damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Ternyata membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi (Dwi Winarno, 2006; 82).

Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi terbukti dengan telah adanya lembaga-lembaga politik demokrasi. Akan tetapi, mengapa demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antarras dan agama, brutalitas, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, berita *hoax* yang menghiasi media sosial. Jawabannya adalah karena kultur demokrasi belum tegak di masyarakat. Boleh jadi negara telah memiliki institusi demokrasi

sedangkan masyarakat belum sepenuhnya berperilaku demokratis. Institusi demokrasi yang tidak didukung perilaku demokratis jelas amat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi adalah demokrasi akan jatuh pada anarki atau demokrasi akan mengundang lawannya sendiri; tampilnya seorang diktator. Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya.

Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupannya dan sudah menjadi kebiasaan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan

tidak sekadar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi hanya akan langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokrasi akan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Kelangsungan pemerintahan demokrasi bersandar pada pengetahuan dan kesadaran demokrasi warga negaranya.

Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang luas sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara rencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda, khususnya dalam pendidikan melek media. Di beberapa negara maju seperti Inggris, Kanada, Australia, Prancis, dan Jerman literasi media sudah menjadi agenda penting bahkan sudah di masukkan kedalam satuan kurikulum pendidikan di sekolah formal (Guntarto dkk, 2011). Sedangkan di Indonesia literasi media belum di-

masukkan dalam satuan kurikulum hanya sebagai sisipan dalam mata pelajaran muatan lokal.

Masyarakat Informasi

Keluarga sebagai bagian dari masyarakat informasi karena di dalam keluarga individu-individu mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama dalam pembentukan karakter, khususnya mengenai literasi media. Maraknya berbagai fenomena negatif atau informasi palsu dalam media sosial direspon dengan keresahan oleh berbagai kalangan masyarakat, serta telah membuktikan bahwa keberadaan kita yang selalu dekat dari media tidak diiringi dengan kemampuan untuk melakukan literasi media atau mengkritisi pesan yang disampaikan oleh media dengan baik, sehingga masyarakat tanpa berpikir panjang dalam menanggapi berbagai pesan yang disampaikan oleh media. Kejadian semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh jika melihat berbagai faktor yang ada, diantaranya kecanggihan media, yang bisa berinteraksi tanpa harus bertatap muka, sehingga individu-individu bisa bebas berinteraksi tanpa berpikir secara matang, pemberitaan media yang mereduksi fakta dapat menghasilkan kenyataan semu, sehingga individu-individu sulit dalam membedakan mana pesan yang benar dan tidak.

Oleh karena itu penggunaan media perlu diberlakukan bagi setiap keluarga, pemberlakuan ini dapat disepakati antar anggota keluarga, karna bagaimana pun komunikasi efektif diantara setiap anggota keluarga sangat diperlukan dari pada pemanfaatan teknologi komunikasi. Namun fenomenanya banyak anggota keluarga yang berdekatan tetapi tidak dekat satu sama lain dikarenakan asyik dengan handphone dan dunianya masing-

masing. Oleh karenanya diperlukan adanya peran kaum perempuan dalam mengarahkan keluarga dengan aturan-aturan yang menjadi kesepakatan anggota keluarga misalnya saja anak boleh menggunakan *gadget* satu hari dalam seminggu atau ketika berada di rumah apa pun bentuk teknologi komunikasi tidak boleh digunakan, dengan adanya hal tersebut diharapkan komunikasi efektif diantara setiap anggota keluarga dapat berjalan dengan baik.

Dari hal-hal yang digambarkan diatas oleh karenanya sangat diperlukan adanya literasi media bagi kaum perempuan, agar dapat memberikan pemahaman dan mengawasi setiap anggota serta menyeimbangkan antara kebutuhan akan media dan posisinya sebagai seorang istri, seorang ibu, dan teman bagi anak-anaknya. Namun harapan agar kaum perempuan dapat melek media masih memerlukan perjalanan yang sangat panjang karna menurut Baran (1999) harus mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Mampu dan mau memahami isi, menaruh perhatian dan menyaring hal-hal buruk; b) Paham dan respek pada kekuatan isi media; c) Mampu membedakan sifat emosi rasa reaksi yang ditimbulkan ketika merespon pesan; d) Memiliki tuntutan kualitas isi media yang tinggi; e) Memahami peraturan dan menyadari bila peraturan dilanggar atau dicampuradukan; f) Mampu berpikir kritis tentang isi media dengan mengabaikan seberapa kredibel sumbernya; dan g) Mengetahui bahasa internal berbagai media dan memahami efeknya (dalam Rahmi Mulyasih, 2016;87). Melek media yang dipaparkan oleh Baran, harus dipahami secara baik oleh kaum perempuan karena yang berperan penting dalam rumah tangga adalah ibu atau kaum perempuan, bukan laki-laki atau suami

sebagai kepala rumah tangga. Tapi di zaman sekarang pola asuh anak di mana peran ayah sangat diperlukan juga. Oleh karenanya jika kaum perempuan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang media dapat merugikan bagi perkembangan anak-anak mereka karna bagaimana pun fungsi media bukan sebagai alat pengasuh dalam menjaga anak-anak (*electronic babysitter*) namun sebagai penunjang peningkatan informasi dan hiburan dalam kegiatan manusia. Dengan demikian literasi keluarga adalah suatu konsep yang digunakan untuk praktik literasi yang melibatkan orangtua, anak, dan anggota keluarga lainnya di rumah. Konsepsi literasi keluarga juga digunakan untuk menjelaskan beragam program tertentu yang mengangkat arti penting dimensi keluarga dalam mempelajari dan mempraktikkan literasi. Karena keluarga menjadi bagian yang sangat penting dalam masyarakat informasi.

Jika dipahami dengan baik, literasi media dan pendidikan demokrasi merupakan solusi bagi masyarakat informasi lebih cerdas, kritis, dan bijak untuk mencari, menggunakan informasi dalam menjalankan aktifitasnya, sehingga tidak menjadi korban atau terjebak oleh fakta palsu (*hoax*) maupun berita palsu (*fake news*) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Manusia pada dasarnya tidak lepas dari komunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya, baik secara langsung maupun tidak langsung berusaha mendapatkan informasi sehingga mereka mempunyai makna dalam kehidupan di masyarakat. Hal tersebut secara konstitusional sudah diatur dalam pasal 28 F UUD NRI 1945 dan khusus untuk media sosial diatur

dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Tapi faktanya sampai saat ini banyak masyarakat informasi menjadi korban dari media sosial dengan bertebarannya fakta palsu (*hoax*) maupun berita palsu (*fake news*) yang berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat informasi dan sangat membahayakan keutuhan bangsa.

Oleh karena itu sangat diperlukan literasi media dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat informasi untuk dapat lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam memilih dan menentukan informasi sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi khususnya dalam dunia maya.

Saran

Literasi media dan pendidikan demokrasi menjadi faktor penting dalam masyarakat informasi menuju pada revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu massif mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berkehendak untuk memilih dan memilah informasi dengan cerdas, kritis, dan bijak. Sehingga dalam hal ini diharapkan bagi semua pengampu kepentingan tanpa terkecuali, untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa khususnya media sosial sebagai aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Douglas, K. (2010) *Budaya Media : Cultur Studies, Identitas , dan Politik: Antara Modern dan Posmodern*. Yogyakarta: Jalasutra

Iriantara, Yosol (2009) *Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2011). *Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload*. New York: Bloomsbury

Kurnia, Novi. (2017). *Literasi Digital Keluarga*. Yogyakarta : CFDS

Lewandowsky, S., Oberauer, K., & Gignac, G. E. (2013). *NASA Faked the Moon Landing-Therefore, (Climate) Science is a Hoax: An Anatomy of the Motivated Rejection on Science*. *Psychological Science*, 622-633

Piliang, Y. A. (2010). *Dunia yang Dilipat (edisi keempat)*. Bandung: Matahari

Potter, J. W. (2001). *Media Literacy (second edition ed.)*. London: Sage Publications.

Rosenbaum, J. E., Beentjes, J. W., & Konig, R. P. (2008). *Mapping Media Literacy: Key Concepts and Future Directions*. *Annals of the International Communication Association*, 32(1), 313-353.

Sutanto, Yusuf (2018) *Pancasila: Tacit Knowledge Untuk Kehidupan Jaring Pengaman Peradaban Dunia*. Jakarta : Idemedia

Tamburaka, A. (2013). *Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Dwi (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 32 Tahun 2003 tentang penyiaran

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Jurnal

Alip Kunandar. (2014) *Model Literasi Media Pada Anak dalam Mencegah*

Konflik Sosial. Vol 7 No. 1. Yogyakarta : E- Jurnal Profetik.

Gunarto, dkk. (2011) *Konsep dan Implementasi Media Literacy di Indonesia*. Makalah Workshop Nasional Konsep dan Implementasi Media.

Joko Sutarso. (2017) *Literasi Media Sosial dalam Merangkai Keberagaman dalam Harmonisasi Budaya Nasional*. Surakarta

Rahmi Mulyasih. (2016). *Pentingnya Literasi bagi Kaum Perempuan*. Vol 4 No. 3 Jurnal Lontar.